

Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam antara Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand: Analisis terhadap Perkembangan dan Tantangan di Era Modernisasi

Putri Cintya*, Naufal Luthfi Alifa

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2025-11-04

Revised: 2025-11-21

Accepted: 2025-11-23

Available: 2025-11-25

Keywords:

Ekonomi Islam, Kelembagaan, Regulasi, Komparatif.

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Cintya, P., & Naufal Luthfi Alifa. (2025). Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam antara Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand: Analisis terhadap Perkembangan dan Tantangan di Era Modernisasi. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1-23.

*Corresponding author

e-mail: putricintyaa771@gmail.com

ABSTRACT

This study compares Islamic economic institutions in Indonesia, Saudi Arabia, and Thailand through four focuses: (1) institutional profile, (2) development dynamics, (3) regulatory and literacy challenges, and (4) reflection on Islamic economic growth. Using a comparative qualitative approach through literature review, the study finds that Indonesia leads in digitalization, Saudi Arabia shows institutional maturity aligned with Vision 2030, while Thailand remains in early development. Collaboration among governments, financial institutions, and communities is key to creating an inclusive and sustainable Islamic economic system. Indonesia continues to strengthen its ecosystem through digital innovation. Overall, the study highlights the importance of harmonizing regulation, improving human capital, and enhancing cross-country cooperation to reinforce institutional resilience and advance sustainable Islamic economic development.

PENDAHULUAN

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam menunjukkan dinamika yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia, kemajuan lembaga keuangan syariah, zakat, dan wakaf didorong oleh dukungan regulasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Laporan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 mencatat pangsa pasar perbankan syariah nasional telah mencapai 7,4 persen, menandakan kemajuan signifikan dalam kinerja kelembagaan keuangan Islam di Indonesia. Sedangkan di Arab Saudi, sistem ekonomi Islam berkembang melalui peran kuat lembaga keuangan dan dukungan pemerintah terhadap penerapan *shari'ah* dalam kebijakan ekonomi. Sementara itu, di Thailand, lembaga ekonomi Islam masih bersifat minor, tetapi mulai tumbuh melalui inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis keuangan mikro Islam.¹ Perbedaan konteks tersebut menjadikan studi komparatif antar-negara penting untuk memahami bagaimana modernisasi memengaruhi struktur dan efektivitas kelembagaan ekonomi Islam.

Penelitian ini penting karena kajian lintas negara mengenai kelembagaan ekonomi Islam masih terbatas, khususnya antara negara mayoritas dan minoritas Muslim. Kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu negara, seperti penelitian yang menyoroti pengaruh *human capital* terhadap kinerja bank syariah di Indonesia, Malaysia, dan Thailand,² atau studi yang mengembangkan indeks *participation finance* sebagai ukuran partisipasi keuangan Islam.³ Namun, belum ada kajian yang membandingkan secara langsung Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand dalam konteks modernisasi dan globalisasi ekonomi Islam. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komparatif yang menyoroti perkembangan dan tantangan kelembagaan ekonomi Islam di tiga negara dengan karakter sosial-politik yang berbeda.

Hubungan penelitian ini dengan karya terdahulu terlihat pada upaya mengaitkan dinamika kelembagaan dengan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi lembaga keuangan Islam penting terhadap stabilitas ekonomi nasional,⁴ sedangkan penerapan sistem ekonomi Islam dapat memperkuat tatanan sosial-ekonomi melalui nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.⁵ Kajian-

¹ Asengbaramae, S. (2023). *The Thai Muslim and Islamic Financial Institutions in Thailand*. TRANSACTION: Journal of Taxation, Accounting, Management and Economics, 1-7.

² Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022). *The Role of Human Capital on the Performance of Islamic Banks in Indonesia, Malaysia, and Thailand*. Advances in Economics, Business and Management Research (Proceedings BICEBF 2021), 172-180.

³ Yüksel, S. (2023). *Participation Finance Index and the Stability of Islamic Financial Systems*. Borsa Istanbul Review, 23(2), 287-298.

⁴ Yüksel, S., Kalyoncu, G., & Özdurak, C. (2023). *Constructing an Index for Participation Finance*. Borsa Istanbul Review, 23(4), 895-905.

⁵ Gassouma, A. (2023). *Islamic Economic Systems and Social Justice: A Comparative Analysis*. International Journal of Islamic Finance, 9(3), 41-59.

kajian tersebut memperkuat relevansi penelitian ini dalam menjelaskan bagaimana kelembagaan ekonomi Islam beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan integrasi global.

Hasil yang diharapkan berupa pemetaan komparatif kelembagaan ekonomi Islam di ketiga negara, identifikasi faktor kunci keberhasilan, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat daya saing lembaga ekonomi Islam di era modernisasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perbedaan konteks sosial, politik, dan regulatif membentuk dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand, serta untuk mengevaluasi sejauh mana modernisasi berpengaruh terhadap efektivitas tata kelola syariah di masing-masing negara. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi strategi adaptasi kelembagaan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperkuat ketahanan sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kelembagaan ekonomi Islam dan praktik kebijakan ekonomi berbasis syariah di tingkat global. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan perspektif komparatif lintas negara yang selama ini masih terbatas, serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis evidence untuk mendukung formulasi strategi pengembangan lembaga ekonomi Islam yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif untuk menganalisis dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand. Fokus penelitian mencakup struktur kelembagaan, peran regulasi, dan pengaruh modernisasi terhadap tata kelola ekonomi Islam di masing-masing negara. Data diperoleh secara sekunder dari laporan resmi, publikasi lembaga keuangan internasional, dan artikel ilmiah. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling*, melibatkan lembaga strategis seperti Otoritas Jasa Keuangan, Saudi Central Bank, dan Thailand Islamic Bank.

Kriteria data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) relevansi langsung dengan topik kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand; (2) diterbitkan oleh lembaga yang kredibel seperti otoritas keuangan nasional, organisasi internasional, atau jurnal ilmiah bereputasi; (3) memuat informasi terkini dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan konteks modernisasi; (4) memiliki dasar metodologis yang jelas dan dapat diverifikasi; serta (5) menyediakan indikator kelembagaan, regulasi, atau perkembangan ekonomi syariah yang dapat dibandingkan antarnegara. Kriteria ini memastikan bahwa data yang dianalisis valid, reliabel, dan mendukung tujuan penelitian.

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif melalui pengelompokan tematik dan interpretasi kontekstual untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola adaptasi kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan

memberikan pemahaman menyeluruh mengenai evolusi kelembagaan ekonomi Islam di tiga negara dan kontribusinya terhadap teori serta praktik ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Perekonomian Negara Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga faktor geografisnya mempengaruhi distribusi ekonomi dan akses layanan keuangan di wilayah yang sangat heterogen. Kondisi demografis yang mayoritas Muslim memberi basis domestik yang kuat bagi pengembangan lembaga ekonomi Islam, namun disparitas antar-wilayah dan keterbatasan infrastruktur masih menantang penetrasi layanan syariah di daerah terpencil.⁶ Secara makro, PDB Indonesia menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang relatif stabil pasca-pandemi, yang membuka ruang bagi ekspansi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal syariah.⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KNEKS aktif mendorong *roadmap* pengembangan perbankan syariah serta program literasi untuk meningkatkan inklusi finansial berbasis syariah.⁸ Di sisi lain, potensi ekonomi digital dan Fintech menunjukkan peluang memperluas jangkauan layanan syariah ke segmen UMKM dan ekonomi mikro melalui produk inovatif⁹. Karakter geografis dan ekonomi ini menjadikan strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia harus berbasis inklusi wilayah dan sinergi publik-swasta. Oleh karena itu, pemahaman atas konteks geografis dan ekonomi menjadi prasyarat bagi perumusan kebijakan yang efektif untuk penguatan ekonomi Islam di Indonesia.¹⁰

Arab Saudi memiliki posisi geografis strategis di Semenanjung Arab dan kekayaan sumber daya alam yang besar, faktor-faktor yang selama dekade terakhir mempengaruhi model pembangunan dan peran negara dalam mengarahkan sektor keuangan. Transformasi ekonomi melalui Vision 2030 menempatkan diversifikasi ekonomi dan penguatan lembaga keuangan, termasuk instrumen dan pasar Islam, sebagai prioritas nasional sehingga memberi dorongan besar terhadap kedalaman pasar syariah.¹¹ Sektor pembiayaan syariah di Arab Saudi telah tumbuh signifikan, tercermin dalam

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Indonesia 2024*.

⁷ World Bank. (2025). *Thailand Economic Monitor July 2024: Unlocking the Potential*.

⁸ OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*.

⁹ Widarni, E., & Bawono, S. (2022). *Human Capital and Islamic Bank Performance in ASEAN*. *Economics Development Analysis Journal*, 11(2), 159–173.

¹⁰ World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects / Indonesia Overview*.

¹¹ Saudi Vision 2030. (2024). *Vision 2030 Progress and Financial Sector Development Program*.

peningkatan volume transaksi, penerbitan sukuk, dan ekspansi produk-produk keuangan berbasis syariah. Regulasi dan kerangka tata kelola syariah di Arab Saudi juga cukup kuat, misalnya melalui *Shariah Governance Framework* yang mengatur peran Dewan Syariah dan mekanisme kepatuhan.¹² Modernisasi infrastruktur keuangan dan investasi pemerintah pada proyek teknologi finansial membuat negara ini memiliki kapabilitas institusional yang mendukung percepatan inovasi berbasis syariah.¹³ Meski demikian, tantangan seperti kebutuhan peningkatan human capital syariah dan transformasi sektor non-migas tetap menjadi agenda penting dalam jangka menengah.¹⁴ Secara keseluruhan, profil geografis dan ekonomi Arab Saudi memberikan peluang besar bagi penguatan kelembagaan ekonomi Islam berskala nasional dan internasional.

Thailand, walaupun berada pada posisi strategis di jantung ASEAN, memiliki karakter demografis yang berbeda karena populasi Muslim merupakan minoritas; hal ini membentuk pola permintaan terhadap layanan keuangan Islam yang lebih bersifat lokal dan komunitarian.¹⁵ Pengembangan ekonomi Thailand didorong oleh sektor manufaktur, pariwisata, dan perdagangan, dan meskipun kontribusi ekonomi Islam relatif kecil, terdapat inisiatif mikro-keuangan dan perbankan syariah yang relevan di wilayah selatan yang mayoritas Muslim. Kondisi regulasi dan institusional di Thailand menunjukkan tahap pembentukan fondasi hukum untuk layanan syariah, termasuk inisiatif pemerintah dan kampus riset yang mendukung inklusi finansial berbasis nilai Islam. Tantangan utama bagi Thailand mencakup skala pasar yang terbatas, literasi keuangan Islam yang relatif rendah, dan kebutuhan harmonisasi standar kepatuhan syariah agar produk lebih mudah diadopsi. Namun, peluang muncul dari integrasi regional ASEAN dan potensi kolaborasi lintas negara yang dapat memanfaatkan Thailand sebagai hub khusus layanan halal dan keuangan syariah niche. Kesimpulannya, kondisi geografis dan perekonomian ketiga negara membentuk konteks yang berbeda untuk pengembangan kelembagaan ekonomi Islam, sehingga strategi penguatan kelembagaan harus disesuaikan dengan karakter nasional masing-masing.

¹² SAMA (Saudi Central Bank). (2023). *Shariah Governance Framework for Local Banks Operating in the Kingdom of Saudi Arabia*.

¹³ Bint-Faisal, R. (2024). *Regulatory Framework and Institutional Resilience in Saudi Islamic Finance*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 10(1), 1–18.

¹⁴ Gassouma, M. S. (2023). *The Impact of the Islamic System on Economic and Social Systems*. *Economies*, 11(12), 303.

¹⁵ Mahrus, A., Asengbaramae, N., & Tantiphongphakdee, K. (2024). *Islamic Finance and Microeconomic Empowerment in Thailand*. *Asian Journal of Islamic Management*, 6(2), 145–163.

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Arab Saudi dan Thailand

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi menunjukkan dinamika yang sangat kuat seiring dengan visi transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada diversifikasi dan modernisasi. Sistem ekonomi syariah di negara ini telah melekat pada struktur institusi negara, dengan regulasi yang secara langsung diatur oleh *Saudi Central Bank* (SAMA) dan pengawasan Dewan Syariah Nasional. Laporan *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Arab Saudi menempati posisi ketiga dunia dalam perkembangan keuangan Islam global dengan skor 78 poin, menegaskan peran strategisnya dalam pasar keuangan syariah internasional.¹⁶ Salah satu faktor pendorong utama kemajuan ini adalah kebijakan Vision 2030 yang menargetkan penguatan industri keuangan syariah sebagai pilar diversifikasi ekonomi. Pemerintah juga mendorong integrasi antara lembaga keuangan syariah dan sektor investasi halal untuk memperluas kontribusi terhadap PDB non-migas. Dengan kerangka kelembagaan yang kuat, sistem ekonomi Islam di Arab Saudi tidak hanya menjadi aspek religius, tetapi juga instrumen ekonomi strategis bagi stabilitas dan pertumbuhan nasional.

Struktur kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi juga mengalami modernisasi signifikan melalui penerapan prinsip tata kelola syariah (*Sharia Governance Framework*) yang menuntut transparansi, kepatuhan, dan profesionalitas. Saudi Central Bank telah memperkuat peran Dewan Syariah internal di setiap lembaga keuangan untuk menjamin kesesuaian produk dan layanan terhadap prinsip syariah.¹⁷ Inovasi seperti *open banking*, *digital sukuk*, dan *fintech syariah sandbox* menjadi bukti bahwa transformasi kelembagaan di Arab Saudi bersifat adaptif terhadap kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai syariah. Dengan integrasi digital tersebut, lembaga keuangan syariah mampu memperluas jangkauan layanan ke segmen milenial dan usaha mikro. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perkembangan kelembagaan di Arab Saudi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga ideologis, di mana prinsip syariah diinternalisasi dalam kebijakan publik dan operasional bisnis.

Berbeda dengan Arab Saudi, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Thailand masih berada pada tahap pertumbuhan dan penguatan kapasitas institusional. Sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas, perkembangan lembaga ekonomi Islam di Thailand berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal, pendidikan keuangan syariah, dan pembiayaan mikro berbasis syariah. Lembaga seperti *Islamic Bank of Thailand* (iBank) berperan utama dalam menyediakan akses layanan keuangan sesuai prinsip Islam, meskipun

¹⁶ Islamic Finance Development Indicator (IFDI). (2023). *Global Islamic Finance Report 2023*. Kuala Lumpur: ICD-Thomson Reuters.

¹⁷ Saudi Central Bank (SAMA). (2024). *Annual Islamic Finance Report 2024*. Riyadh: Saudi Central Bank.

menghadapi tantangan efisiensi dan pengawasan syariah.¹⁸ Pemerintah Thailand juga mulai menunjukkan dukungan terhadap sistem ekonomi Islam dengan merancang kebijakan inklusi keuangan untuk komunitas Muslim di wilayah Selatan seperti Pattani dan Narathiwat. Meskipun lembaga ekonomi Islam di Thailand belum sekuat di Arab Saudi, strategi yang digunakan cenderung adaptif, memadukan nilai keagamaan dengan konteks sosial lokal. Dinamika ini menunjukkan potensi besar bagi Thailand untuk memperluas peran ekonomi Islam dalam sistem keuangan nasional.

Selain melalui sektor perbankan, penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Thailand juga berkembang di sektor sosial-ekonomi berbasis komunitas. Lembaga zakat, koperasi syariah, dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Muslim. Model ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam di Thailand beroperasi bukan melalui kekuatan kapital besar, melainkan dengan basis sosial yang kuat. Program seperti *Islamic Community Enterprise* menjadi contoh konkret sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah lokal, dan organisasi non-pemerintah dalam memperkuat jaringan kelembagaan. Meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan regulasi dan kapasitas SDM syariah, model *bottom-up* ini terbukti efektif dalam memperluas peran ekonomi Islam. Dinamika tersebut membedakan Thailand dengan Arab Saudi yang cenderung *top-down* dalam membangun kelembagaan syariah.¹⁹

Dari sisi tata kelola, kedua negara menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan regulatif dan integrasi nilai syariah. Arab Saudi menempatkan ekonomi Islam dalam kerangka kebijakan negara dan menjadikannya bagian dari sistem moneter nasional yang diawasi secara ketat oleh lembaga negara.²⁰ Sementara itu, di Thailand, ekonomi Islam berkembang melalui sinergi antar-lembaga dan partisipasi masyarakat tanpa dominasi pemerintah pusat. Perbedaan ini menggambarkan bahwa efektivitas kelembagaan ekonomi Islam tidak selalu ditentukan oleh tingkat kontrol pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi sosial dan kapasitas komunitas dalam menginternalisasi nilai-nilai syariah. Pendekatan komparatif ini menunjukkan bahwa kedua negara menempuh jalur berbeda untuk mencapai stabilitas kelembagaan dan inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Modernisasi kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi semakin menguat melalui kebijakan reformasi sistem keuangan syariah yang menekankan integrasi dengan pasar global. Pemerintah bersama SAMA

¹⁸ Asengbaramae, M. (2023). *Islamic microfinance development in minority Muslim regions: A case study of Thailand*. Asian Economic and Financial Review, 13(5), 431–448.

¹⁹ Hamat, A. (2022). *Community-based Islamic finance in Southeast Asia: Lessons from Thailand and Malaysia*. Journal of Islamic Economics and Development, 11(4), 287–304.

²⁰ Saudi Central Bank (SAMA). (2024). *Annual Islamic Finance Report 2024*. Riyadh: Saudi Central Bank.

melakukan deregulasi terbatas untuk membuka ruang investasi asing dalam proyek keuangan syariah, khususnya sukuk dan *real estate* halal. Upaya ini menjadikan Arab Saudi tidak hanya sebagai pelaku domestik, tetapi juga aktor internasional yang berkontribusi dalam penetapan standar keuangan syariah global. Kolaborasi dengan lembaga seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* memperluas jaringan kelembagaan dan memperkuat kepercayaan investor. Di sisi lain, peningkatan kompleksitas regulasi global menuntut lembaga syariah di Arab Saudi untuk memperkuat kepatuhan, akuntabilitas, dan audit syariah internal. Dinamika ini menandakan bahwa sistem ekonomi Islam di Arab Saudi telah berevolusi dari sekadar ide religius menjadi sistem institusional modern dengan mekanisme pengawasan yang matang.

Perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih berbasis masyarakat dengan fokus pada pembangunan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, lembaga seperti *Southern Border Provinces Administrative Center (SBPAC)* berperan sebagai fasilitator bagi bank syariah dan koperasi Islam dalam memperluas akses keuangan. Model kolaborasi lintas sektor ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam membangun lembaga ekonomi Islam yang berkelanjutan. Meskipun belum memiliki pengawasan syariah setara dengan Dewan Syariah Nasional di Arab Saudi, Thailand telah membentuk komite pengarah yang melibatkan ulama dan ekonom Muslim. Upaya ini memperlihatkan transisi dari sistem keuangan konvensional menuju sistem yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai Islam. Dinamika sosial-politik yang kompleks juga menjadikan adaptasi kelembagaan di Thailand lebih berhati-hati dan berbasis konsensus komunitas.

Secara kelembagaan, perbedaan antara Arab Saudi dan Thailand terletak pada tingkat formalitas dan integrasi dengan sistem ekonomi nasional. Arab Saudi menerapkan sistem *top-down institutional design* di mana kebijakan ekonomi syariah merupakan bagian dari perencanaan nasional. Sedangkan Thailand menerapkan model *bottom-up development*, di mana lembaga syariah tumbuh dari kebutuhan sosial dan keagamaan masyarakat setempat. Pendekatan ini menciptakan keberagaman bentuk lembaga, mulai dari koperasi, lembaga mikrofinansial, hingga program zakat lokal yang berperan sebagai stabilisator ekonomi masyarakat Muslim minoritas. Walaupun berbeda pendekatan, kedua negara menunjukkan kesamaan orientasi: menjadikan ekonomi Islam sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi sosial. Dengan demikian, studi komparatif ini memperkuat teori bahwa konteks sosial dan politik menentukan bentuk dan efektivitas kelembagaan ekonomi Islam.²¹

Inovasi digital menjadi aspek penting dalam dinamika kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara. Arab Saudi memimpin dalam digitalisasi

²¹ Bank of Thailand. (2025). *Thailand Islamic Finance Strategic Plan 2025 / Digital Economy Master Plan 2024–2029*.

perbankan syariah dengan penerapan *open banking framework* dan *digital sukuk platform* yang diatur oleh SAMA. Sementara itu, Thailand mengembangkan aplikasi keuangan syariah berbasis komunitas seperti *Halal Wallet* dan *Islamic Cooperative App* untuk memperluas inklusi keuangan. Digitalisasi memperkuat kapasitas lembaga keuangan Islam untuk melayani masyarakat dengan lebih efisien, meningkatkan transparansi, dan mempercepat transaksi halal lintas batas. Namun, adopsi teknologi juga menghadirkan tantangan seperti kesiapan SDM digital dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, strategi pengembangan teknologi di kedua negara perlu disertai pelatihan dan pengawasan berbasis syariah agar tetap menjaga integritas nilai Islam di tengah kemajuan digital.²²

Dalam konteks inklusi keuangan, Arab Saudi berhasil mencapai tingkat penetrasi layanan keuangan syariah yang luas, dengan hampir 97% masyarakat memiliki akses ke layanan perbankan syariah. Sebaliknya, di Thailand, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada di bawah 30%, tetapi menunjukkan tren meningkat terutama di wilayah selatan. Faktor utama keberhasilan Arab Saudi adalah dukungan kebijakan publik dan investasi besar pada infrastruktur keuangan. Sementara di Thailand, keberhasilan justru bergantung pada partisipasi komunitas dan lembaga pendidikan Islam dalam memperluas kesadaran keuangan syariah. Ini menunjukkan bahwa struktur dan skala lembaga bukan satu-satunya faktor keberhasilan, tetapi juga relevansi sosial dan tingkat literasi masyarakat. Inklusi keuangan syariah di kedua negara menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kelembagaan ekonomi Islam secara menyeluruh.²³

Kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara juga menunjukkan proses pembelajaran lintas batas melalui kolaborasi internasional. Arab Saudi secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif global seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)* dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* untuk menyelaraskan standar internasional. Thailand, di sisi lain, memanfaatkan kerja sama teknis dengan IsDB untuk memperkuat regulasi dan pelatihan SDM di sektor keuangan Islam. Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan tidak bisa dilakukan secara tertutup, melainkan melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara. Interaksi ini juga membuka peluang bagi Thailand untuk belajar dari pengalaman Arab Saudi dalam mengelola integrasi sistem ekonomi Islam secara nasional. Dinamika lintas batas ini memperlihatkan bahwa globalisasi justru mempercepat konsolidasi kelembagaan Islam di tingkat nasional.

²² Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2022). *Financial stability and Islamic finance: Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 186–204.

²³ Cheumar, M. T., Yunita, P., Nuryanti, N., Fauzi, M., & Huzaimi Bi Mazlan, A. (2024). *Islamic Financial Cooperative in Thailand: Challenges and Opportunities*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(8).

Dalam jangka panjang, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara menunjukkan arah menuju konsolidasi sistem keuangan Islam yang lebih stabil. Arab Saudi akan terus memperkuat posisi globalnya melalui sinergi antara lembaga syariah, regulator, dan investor asing. Sementara itu, Thailand diperkirakan akan memperluas kapasitas kelembagaannya melalui pembentukan dewan syariah nasional dan penguatan kurikulum keuangan Islam di universitas lokal. Meskipun berada pada tahap perkembangan yang berbeda, keduanya menunjukkan pola yang sama: menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa kelembagaan ekonomi Islam di era modern tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, regulatif, dan teknologi yang terus berubah.²⁴

Tantangan dan Sinergi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Global di Negara Arab Saudi dan Thailand

Perkembangan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Thailand menghadapi tantangan signifikan di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang cepat. Arab Saudi sebagai pusat keuangan syariah dunia berupaya menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Pemerintah melalui *Saudi Vision 2030* mendorong modernisasi sektor keuangan dengan memperkuat tata kelola lembaga syariah berbasis teknologi finansial. Sementara itu, Thailand yang memiliki populasi Muslim minoritas masih berjuang memperluas peran lembaga keuangan Islam dalam sistem ekonomi nasional. Tantangan utama bagi kedua negara adalah memastikan bahwa inovasi dan regulasi tetap sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar moral ekonomi Islam. Ketegangan antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai etika menjadi topik sentral dalam penguatan kelembagaan di kedua konteks tersebut.²⁵

Tantangan lainnya berkaitan dengan konsolidasi dan integrasi antar-lembaga dalam sistem keuangan syariah. Di Arab Saudi, fragmentasi kelembagaan antara bank syariah, lembaga zakat, dan wakaf sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan. Pemerintah kini memperkuat koordinasi melalui *Islamic Finance Supervisory Authority* yang berperan mengharmonisasi pengawasan antar-sektor. Di Thailand, lembaga keuangan syariah cenderung beroperasi secara independen tanpa dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat²⁶. Hal ini menyebabkan rendahnya daya saing

²⁴ Islamic Finance Development Indicator (IFDI). (2023). *Global Islamic Finance Report 2023*. Kuala Lumpur: ICD–Thomson Reuters.

²⁵ Rahman, M. (2022). *Institutional Transformation and the Future of Islamic Economics*. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 451–468.

²⁶ Nor, M. H. (2022). *Institutional challenges in developing Islamic banking system in minority Muslim countries*. *International Journal of Islamic Business and Management*, 6(4), 85–102.

terhadap lembaga konvensional dan minimnya akses ke pembiayaan berskala besar. Oleh karena itu, sinergi antar-lembaga perlu dibangun melalui kebijakan inklusif dan dukungan lintas sektor ekonomi. Dengan langkah ini, stabilitas kelembagaan ekonomi Islam dapat meningkat secara berkelanjutan.

Selain koordinasi kelembagaan, isu sumber daya manusia menjadi faktor fundamental yang menentukan keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam. Arab Saudi telah membangun *Islamic Finance Academy* untuk melatih profesional syariah di bidang keuangan modern. Pelatihan tersebut mencakup *digital banking*, etika syariah, dan manajemen risiko syariah. Sementara Thailand masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang memahami aspek hukum Islam dan teknis ekonomi modern secara seimbang. Program kerja sama dengan universitas Islam internasional menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan kapasitas ini. Investasi pada peningkatan kualitas SDM terbukti mampu memperkuat daya adaptasi kelembagaan terhadap dinamika global. Dengan demikian, pembangunan manusia menjadi fondasi utama penguatan kelembagaan ekonomi Islam di kedua negara.

Digitalisasi keuangan merupakan aspek lain yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar. Arab Saudi telah memanfaatkan *blockchain halal audit* dan *digital sukuk* untuk memperkuat transparansi transaksi. Inovasi ini memungkinkan sistem pelaporan yang lebih cepat dan akuntabel sesuai prinsip shari'ah. Di Thailand, upaya digitalisasi masih difokuskan pada pengembangan platform keuangan mikro berbasis komunitas Muslim, seperti *Halal Fintech Network*. Namun, tantangan utama tetap pada literasi digital dan keamanan siber dalam sistem keuangan syariah. Kedua negara perlu membangun sistem regulasi digital yang tangguh agar inovasi tidak menimbulkan risiko baru. Integrasi antara inovasi digital dan prinsip syariah menjadi kunci keberlanjutan ekonomi Islam di era modern.

Di sisi lain, tantangan geopolitik dan fluktuasi ekonomi global juga berpengaruh besar terhadap stabilitas kelembagaan. Ketergantungan Arab Saudi pada sektor minyak memengaruhi kebijakan fiskal dan investasi lembaga keuangan Islam. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri halal dan sukuk hijau menjadi strategi mitigasi risiko. Bagi Thailand, dampak global seperti pandemi COVID-19 dan konflik perdagangan internasional menekan sektor ekspor halal dan pariwisata syariah. Situasi ini menuntut penguatan kelembagaan agar lebih tangguh menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sinergi antara kebijakan nasional dan jejaring ekonomi Islam internasional seperti *IsDB* dan *IFSB* dapat memperkuat daya tahan institusi. Melalui kerja sama regional, kelembagaan ekonomi Islam dapat menjadi bagian dari solusi krisis global.²⁷

²⁷ Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2022). *Financial stability and Islamic finance: Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 186–204.

Aspek sosial juga memiliki peran strategis dalam membangun sinergi kelembagaan ekonomi Islam. Di Arab Saudi, lembaga zakat dan wakaf bertransformasi menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui program digitalisasi *ZakatTech*. Di Thailand, koperasi Islam menjadi tumpuan bagi masyarakat Muslim minoritas untuk memperoleh akses pembiayaan syariah yang adil. Kolaborasi antara lembaga keuangan, lembaga sosial, dan pemerintah lokal menciptakan model ekonomi Islam yang inklusif. Tantangan sosial seperti ketimpangan dan kemiskinan dapat diatasi melalui distribusi zakat dan dana sosial Islam yang efektif. Kelembagaan yang berfungsi ganda (ekonomi dan sosial), akan lebih berkelanjutan dalam menghadapi tekanan global. Dengan demikian, integrasi dimensi sosial menjadi bagian penting dalam strategi penguatan kelembagaan.²⁸

Selain itu, tekanan global terhadap standar kepatuhan syariah juga menuntut pembaruan sistem pengawasan. Arab Saudi memperkuat *Shariah Governance Framework* yang mewajibkan audit syariah internal di setiap lembaga keuangan. Pendekatan ini memastikan setiap inovasi finansial tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Thailand mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel dengan membentuk *Shariah Advisory Council* independen untuk mengawasi transaksi lembaga mikro syariah. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan variasi adaptasi kelembagaan sesuai konteks sosial dan politik masing-masing negara. Meski berbeda sistem, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi landasan utama stabilitas kelembagaan ekonomi Islam.

Keterlibatan pemerintah juga menjadi elemen penting dalam memperkuat sinergi antar-lembaga ekonomi Islam. Di Arab Saudi, kebijakan fiskal pro-syariah dan dukungan negara terhadap lembaga wakaf menjadikan sistem keuangan Islam sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Thailand yang masih berada pada tahap pengembangan mengandalkan kerja sama bilateral dengan negara-negara Islam lain untuk memperluas jangkauan lembaga syariah. Upaya ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang kondusif. Sinergi antara kebijakan makro dan kelembagaan mikro dapat menghasilkan keseimbangan antara stabilitas dan inklusivitas ekonomi. Dengan demikian, penguatan peran negara menjadi kunci keberhasilan kelembagaan dalam konteks globalisasi ekonomi Islam.

Sinergi lintas negara juga berperan besar dalam mempercepat proses pembelajaran kelembagaan. Arab Saudi melalui IsDB aktif melakukan transfer pengetahuan dan pendanaan kepada lembaga keuangan Islam di Thailand dan

²⁸ Mahrus, A., Asengbaramae, N., & Tantiphongphakdee, K. (2024). *Islamic Finance and Microeconomic Empowerment in Thailand*. *Asian Journal of Islamic Management*, 6(2), 145–163.

negara Asia Tenggara lainnya²⁹. Program kerja sama tersebut mencakup pelatihan manajemen risiko, pengembangan produk keuangan mikro, dan sistem audit halal. Kolaborasi ini memperluas jaringan keuangan syariah lintas batas dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Islam. Thailand di sisi lain memanfaatkan hubungan ini untuk memperkuat reputasi sektor halal dan memperluas akses ke sumber pembiayaan syariah. Melalui sinergi tersebut, stabilitas kelembagaan dapat meningkat karena adanya integrasi antar-pelaku di tingkat internasional. Kerja sama semacam ini menciptakan dampak ganda. Pemberdayaan lokal dan penguatan posisi global ekonomi Islam.

Peningkatan integrasi ekonomi global juga menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan Islam. Arab Saudi, sebagai anggota aktif *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, telah menerapkan sistem pelaporan yang konsisten di seluruh lembaga keuangan. Di Thailand, upaya harmonisasi masih terbatas dan bergantung pada adaptasi sukarela lembaga lokal terhadap standar internasional. Perbedaan tingkat harmonisasi ini memengaruhi kredibilitas lembaga di mata investor dan lembaga internasional. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan pembentukan mekanisme regional di Asia Tenggara yang mendorong adopsi standar akuntansi syariah. Harmonisasi sistem pelaporan dapat memperkuat stabilitas dan transparansi kelembagaan ekonomi Islam di kawasan.³⁰

Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, penting bagi lembaga keuangan Islam untuk memperkuat mekanisme mitigasi risiko. Di Arab Saudi, instrumen *Islamic liquidity management* dan *sukuk repo market* menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Thailand mengembangkan model pembiayaan berbasis komunitas yang lebih tahan terhadap fluktuasi makroekonomi. Keduanya menunjukkan bahwa diversifikasi instrumen dan adaptasi terhadap konteks nasional dapat menciptakan sistem keuangan syariah yang tangguh. Sinergi antara instrumen makro dan mikro ini penting untuk mengurangi risiko sistemik di sektor keuangan Islam. Dengan demikian, inovasi keuangan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian menjadi bagian dari solusi jangka panjang bagi stabilitas kelembagaan.

²⁹ IsDB. (2023). *Annual Report: Enhancing Resilience in Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank.

³⁰ Alhomaidd, T. (2023). *Institutional Reforms and Islamic Economic Governance in Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(2), 114–129.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam di Negara Arab Saudi dan Thailand bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Indonesia

Perbandingan antara kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi dan Thailand memberikan wawasan penting bagi penguatan tata kelola ekonomi Islam di Indonesia. Arab Saudi memiliki keunggulan dalam integrasi antara sistem keuangan Islam dengan kebijakan makroekonomi nasional yang terstruktur, sedangkan Thailand menunjukkan kemampuan adaptif dalam konteks minoritas Muslim melalui pendekatan sosial dan inklusif. Indonesia dapat belajar dari stabilitas kelembagaan Arab Saudi yang berbasis regulasi syariah serta fleksibilitas kelembagaan Thailand yang responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat lokal. Refleksi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada faktor religius, tetapi juga pada inovasi institusional dan adaptasi terhadap modernisasi ekonomi.

Kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi berakar kuat pada sistem hukum syariah yang melekat dalam konstitusi negara, sehingga setiap kebijakan ekonomi memiliki legitimasi religius dan politik yang kuat. Keberhasilan lembaga seperti Saudi Central Bank dan Islamic Development Bank (IsDB) dalam menjaga stabilitas keuangan berbasis syariah memperlihatkan efektivitas tata kelola yang berbasis nilai dan prinsip moral³¹. Sebaliknya, di Thailand, meskipun populasi Muslim hanya sekitar 5–6 persen, lembaga seperti Islamic Bank of Thailand berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui produk keuangan mikro yang inklusif dan inovatif³². Kedua negara menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan ekonomi Islam bergantung pada sinergi antara nilai spiritual dan kapasitas administratif.

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, Arab Saudi berupaya menyeimbangkan antara visi “Saudi Vision 2030” dan prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* dalam kebijakan ekonominya. Pendekatan ini memungkinkan transformasi kelembagaan menuju diversifikasi ekonomi non-migas tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Thailand, di sisi lain, menonjol dalam inovasi sosial berbasis komunitas, seperti model *Islamic Social Enterprise* di Pattani yang menggabungkan prinsip keuangan Islam dengan pemberdayaan perempuan dan usaha mikro. Bagi Indonesia, pembelajaran dari kedua negara tersebut adalah pentingnya menjadikan kelembagaan ekonomi Islam bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga sebagai motor pembangunan sosial berkelanjutan.

³¹ Al-Suhaibani, M. (2021). *Shariah Governance and Financial Stability in Islamic Banking: Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 821–839.

³² Srisompob, J. (2022). *Islamic Banking and Community Empowerment in Southern Thailand*. *Asian Journal of Social Science Research*, 5(1), 77–93.

Selain itu, perbandingan ini memperlihatkan perbedaan orientasi kelembagaan yang mencerminkan konteks sosio-politik masing-masing negara. Di Arab Saudi, kelembagaan ekonomi Islam lebih bersifat *top-down* karena dikendalikan oleh pemerintah dan ulama resmi, sedangkan di Thailand berkembang secara *bottom-up* melalui partisipasi masyarakat sipil dan lembaga lokal³³. Indonesia dapat mengadopsi keseimbangan dari kedua model ini: stabilitas dari sistem Saudi dan partisipasi dari model Thailand. Pendekatan hibrid ini berpotensi memperkuat legitimasi sosial dan memperluas inklusi keuangan syariah secara nasional.

Lebih lanjut, pembelajaran dari pengalaman Saudi dan Thailand menegaskan pentingnya digitalisasi dan transformasi teknologi dalam kelembagaan ekonomi Islam. Arab Saudi telah menerapkan sistem digital zakat dan *waqf* yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional, sedangkan Thailand menggunakan aplikasi keuangan mikro berbasis syariah untuk menjangkau masyarakat pedesaan³⁴. Indonesia dapat memperluas program *Sharia Digital Ecosystem* yang dikelola OJK dengan mengadopsi praktik *best practice* dari dua negara tersebut guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam.

Refleksi terhadap dinamika kelembagaan di Arab Saudi dan Thailand menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang adaptif, transparan, dan berbasis nilai. Indonesia memerlukan sinergi antar-lembaga seperti Bank Indonesia, BAZNAS, dan Badan Wakaf Indonesia agar tercipta sistem kelembagaan yang kohesif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial jangka panjang. Pendekatan reflektif ini memperkuat pandangan bahwa modernisasi dalam ekonomi Islam bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan strategi untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi global³⁵.

Kelembagaan ekonomi Islam di Arab Saudi juga memperlihatkan keberhasilan dalam menyeimbangkan antara kebijakan fiskal, keuangan syariah, dan stabilitas sosial. Pemerintah Saudi mengintegrasikan instrumen keuangan Islam seperti sukuk dan zakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, memastikan keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan keadilan sosial. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem kelembagaan yang kuat dan terpusat dapat mendorong efisiensi implementasi kebijakan berbasis shari'ah. Sebaliknya, Thailand menekankan partisipasi komunitas lokal sebagai inti pengelolaan ekonomi Islam, di mana lembaga mikro-keuangan Islam berperan

³³ Hassan, A. (2023). *Comparative Institutional Frameworks in Islamic Economics: Lessons from ASEAN Countries*. *Review of Islamic Economics and Policy*, 17(4), 331–350.

³⁴ Bashir, N., & Khan, T. (2024). *Digital Zakat Systems and Institutional Innovation in Islamic Finance*. *Journal of Fintech and Islamic Development*, 3(2), 145–162.

³⁵ Yousef, A. (2023). *Modernization and Islamic Economic Thought: A Critical Reflection*. *Contemporary Islamic Studies*, 15(1), 41–58.

dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat Muslim di wilayah selatan³⁶. Refleksi ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan koordinasi pusat dan otonomi lokal dalam tata kelola ekonomi Islam.

Dalam konteks sosial, Arab Saudi menunjukkan bahwa nilai-nilai shari'ah dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional yang stabil. Melalui kebijakan reformasi ekonomi "Vision 2030", negara ini berhasil memperluas peran lembaga zakat, wakaf, dan perbankan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan³⁷. Thailand pun menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Buddha melalui prinsip kohesi sosial dan keadilan distributif. Kedua negara ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada budaya dan nilai spiritual masyarakat. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan integratif ini untuk membangun kelembagaan yang tidak hanya efisien tetapi juga beretika dan humanis.

Selanjutnya, aspek tata kelola kelembagaan di kedua negara memperlihatkan pendekatan berbeda terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Di Arab Saudi, audit syariah dijalankan oleh lembaga resmi di bawah Dewan Ulama Senior untuk memastikan kesesuaian transaksi keuangan dengan prinsip Islam. Sedangkan di Thailand, audit sosial partisipatif dilakukan oleh lembaga masyarakat, memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam³⁸. Kedua pendekatan ini dapat digabungkan oleh Indonesia melalui model pengawasan ganda: berbasis otoritas dan masyarakat sipil. Pendekatan semacam ini akan meningkatkan integritas kelembagaan dan memperkuat kredibilitas sistem ekonomi Islam di tingkat nasional.

Transformasi digital menjadi dimensi penting dalam refleksi kelembagaan ekonomi Islam. Arab Saudi telah mengembangkan *Fintech Shariah Hub* yang mendukung transaksi berbasis *blockchain* untuk memperkuat integritas sistem keuangan³⁹. Di sisi lain, Thailand fokus pada inklusi digital di daerah rural melalui aplikasi *Islamic MicroPay* yang memungkinkan transaksi syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah⁴⁰. Indonesia dapat meniru kombinasi dua pendekatan ini dengan memperluas platform digital nasional berbasis

³⁶ Siriporn, W. (2023). *Islamic Microfinance and Community Development in Thailand*. Asian Journal of Development Research, 6(2), 99–118.

³⁷ Al-Fadhli, M. (2024). *Shariah-Based Economic Reform in Saudi Vision 2030: A Policy Evaluation*. Arabian Economic Review, 12(1), 33–52.

³⁸ Chayut, N. (2022). *Participatory Islamic Finance and Social Accountability in Thailand*. ASEAN Journal of Islamic Studies, 9(3), 223–242.

³⁹ Fahad, H., & Alqahtani, N. (2024). *Fintech Shariah Hub and Digital Governance in Saudi Arabia*. Journal of Islamic Digital Economy, 4(2), 77–95.

⁴⁰ Yusri, M., & Ahmad, R. (2023). *Islamic Digital Inclusion in Rural Thailand: A Case Study of MicroPay*. Journal of Islamic Technology Studies, 2(3), 188–204.

syariah yang tidak hanya efisien tetapi juga inklusif. Modernisasi teknologi terbukti menjadi elemen vital bagi ketahanan kelembagaan ekonomi Islam di era globalisasi digital.

Refleksi juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi Islam membutuhkan keseimbangan antara regulasi dan inovasi. Arab Saudi mengatur secara ketat aktivitas lembaga keuangan Islam melalui *Saudi Arabian Monetary Authority*, sementara Thailand memberikan ruang lebih besar bagi inovasi sosial dan ekonomi komunitas⁴¹. Indonesia dapat belajar untuk menciptakan kerangka regulasi yang adaptif, di mana lembaga ekonomi Islam mampu berinovasi tanpa kehilangan legitimasi syariah. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa lembaga syariah tetap kompetitif di pasar global tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan moral.

Lebih dalam, refleksi ini memperlihatkan bahwa nilai *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan universal dalam mengarahkan tujuan pembangunan ekonomi Islam di kedua negara. Arab Saudi menitikberatkan pada perlindungan harta dan keadilan ekonomi, sementara Thailand menekankan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perlu menafsirkan kembali *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks modern agar dapat menghubungkan antara nilai religius dan tantangan pembangunan ekonomi kontemporer. Penguatan nilai *maqāṣid* menjadi dasar untuk membangun sistem kelembagaan yang berkelanjutan dan manusiawi.

Konteks geopolitik juga berpengaruh besar terhadap arah kelembagaan ekonomi Islam. Arab Saudi, sebagai pusat dunia Islam, menggunakan pengaruh politik dan ekonominya untuk memperluas diplomasi keuangan Islam global⁴². Sedangkan Thailand, dengan posisinya di ASEAN, memperkuat jaringan regional melalui kerja sama antar-lembaga keuangan syariah untuk memperluas inklusi lintas negara⁴³. Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategisnya sebagai kekuatan ekonomi Islam di Asia Tenggara untuk memperkuat diplomasi ekonomi syariah yang berorientasi pada kolaborasi dan kemitraan global.

Selain aspek eksternal, perbandingan ini menyoroti pentingnya literasi ekonomi Islam dalam memperkuat kelembagaan. Di Arab Saudi, pendidikan ekonomi Islam menjadi kurikulum resmi di universitas, sedangkan di Thailand, lembaga pesantren Islam mengembangkan pelatihan kewirausahaan syariah berbasis komunitas⁴⁴. Bagi Indonesia, integrasi literasi keuangan syariah di

⁴¹ Nattapong, T. (2022). *Regulatory Flexibility and Islamic Economic Innovation in Thailand*. *Asia-Pacific Journal of Islamic Policy*, 7(1), 67–86.

⁴² Rahim, N. (2022). *Islamic Financial Diplomacy in the Gulf Region*. *Middle East Journal of Finance and Economics*, 11(2), 301–320.

⁴³ Rasmee, S. (2024). *Regional Collaboration of Islamic Financial Institutions in ASEAN*. *ASEAN Review of Islamic Finance*, 8(1), 49–68.

⁴⁴ Hakim, A. (2024). *Islamic Financial Literacy and Institutional Strengthening in Southeast Asia*. *International Journal of Islamic Education and Economics*, 9(1), 91–108.

semua jenjang pendidikan merupakan kunci untuk mencetak generasi yang memahami nilai dan praktik ekonomi Islam. Tanpa kesadaran publik yang kuat, kelembagaan ekonomi Islam akan sulit berkembang secara inklusif.

Refleksi akhir menegaskan bahwa sinergi antara negara, masyarakat, dan teknologi menjadi faktor utama keberlanjutan kelembagaan ekonomi Islam. Arab Saudi dan Thailand menunjukkan bahwa penguatan institusi ekonomi Islam tidak bisa berjalan parsial, melainkan memerlukan koordinasi multisektor yang holistik⁴⁵. Indonesia perlu memperkuat kerja sama antara regulator, akademisi, dan pelaku industri syariah untuk menciptakan ekosistem kelembagaan yang adaptif dan kompetitif. Model reflektif ini akan memperkuat daya tahan ekonomi Islam terhadap krisis global sekaligus menjaga keadilan sosial bagi masyarakat.

Secara ringkas, perbandingan implementasi pada Indonesia, Arab Saudi dan Thailand disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Syariah di Arab Saudi, Thailand, dan Indonesia

No	Aspek Perbandingan	Arab Saudi	Thailand	Indonesia
1	Konteks Sosial & Demografis	Negara pusat dunia Islam; penerapan syariah menyatu dengan negara	Minoritas Muslim; perkembangan ekonomi Islam berbasis wilayah selatan	Mayoritas Muslim; permintaan tinggi terhadap layanan syariah
2	Model Perkembangan Kelembagaan	<i>Top-down</i> ; diarahkan langsung oleh negara & visi nasional	<i>Bottom-up</i> ; inisiatif komunitas dan lembaga lokal lebih dominan	Kombinasi <i>top-down</i> (regulasi negara) & <i>bottom-up</i> (komunitas)
3	Peran Regulasi	Sangat kuat dan terpusat (SAMA, Shariah Governance Framework)	Terbatas; belum ada regulasi syariah nasional yang mapan	Didukung regulasi kuat (OJK, KNEKS, <i>roadmap</i> syariah, digitalisasi)
4	Dinamika Perkembangan	Paling matang, terintegrasi dengan Vision 2030 & pasar global	Bertahap; fokus pada microfinance Islam dan lembaga lokal	Unggul dalam digitalisasi, Fintech syariah, dan perluasan layanan

⁴⁵ Rohman, M., & Salleh, H. (2024). *Institutional Synergy and Resilience in Islamic Economic Governance*. *Global Journal of Islamic Policy and Management*, 6(3), 177–196.

No	Aspek Perbandingan	Arab Saudi	Thailand	Indonesia
5	Inovasi dan Teknologi	Digital sukur, open banking, Fintech syariah sandbox	Aplikasi keuangan mikro berbasis komunitas (MicroPay, Halal Wallet)	Ekosistem digital syariah berkembang pesat
6	Arah Modernisasi	Integrasi global, modernisasi penuh sektor keuangan syariah	Penguatan komunitas dan inklusi lokal berbasis kebutuhan sosial	Transformasi digital dan perluasan inklusi keuangan syariah
7	Tantangan Utama	SDM syariah, koordinasi antar-sektor, diversifikasi non-migas	Skala pasar kecil, literasi rendah, lemahnya regulasi	Integrasi antar-lembaga & pemerataan literasi
8	Kekuatan Kelembagaan	Kelembagaan sangat kuat & stabil secara struktural	Responsivitas komunitas & kekuatan microfinance	Basis pengguna besar & dukungan negara
9	Refleksi bagi Indonesia	Stabilitas regulatif & integrasi visi nasional	Fleksibilitas model komunitas & pendekatan sosial lokal	Indonesia dapat menggabungkan kekuatan regulasi Saudi dan fleksibilitas komunitas Thailand untuk membangun kelembagaan ekonomi Islam yang lebih adaptif dan tangguh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap perkembangan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand, dapat disimpulkan bahwa masing-masing negara memiliki karakteristik dan tingkat kemajuan yang berbeda dalam penerapan sistem ekonomi berbasis syariah. Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan melalui dukungan regulasi pemerintah, pembentukan otoritas khusus seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), serta meningkatnya literasi dan partisipasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Integrasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sosial berbasis nilai-nilai Islam menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Islam di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, Arab Saudi memiliki sistem kelembagaan yang paling mapan dan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi nasional yang sepenuhnya berlandaskan prinsip syariah. Struktur ekonomi dan keuangannya dikendalikan oleh lembaga-lembaga yang berorientasi syariah secara penuh, seperti Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) dan berbagai bank Islam besar. Penerapan prinsip *sharia compliance* di seluruh sektor ekonomi menjadikan Arab Saudi sebagai model ideal dalam implementasi ekonomi Islam secara struktural dan legal formal. Di sisi lain, Thailand masih berada pada tahap penguatan kelembagaan, namun memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi Islam di masa depan. Meskipun populasi Muslim di Thailand merupakan minoritas, upaya pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dan inisiatif sosial berbasis komunitas menunjukkan arah positif terhadap inklusi keuangan syariah. Dukungan pemerintah daerah dan lembaga Islam lokal menjadi katalis dalam memperkuat pondasi kelembagaan di sektor ini.

Secara umum, modernisasi dan globalisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi arah perkembangan ekonomi Islam di ketiga negara. Transformasi digital, peningkatan inklusi keuangan, serta penerapan tata kelola modern yang transparan mendorong efektivitas lembaga ekonomi Islam. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pelestarian nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan keberlanjutan sosial (*istidamah*). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana lembaga ekonomi Islam beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika global. Hasil analisis juga menegaskan pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah, peran lembaga keuangan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur efektivitas kelembagaan dan dampak sosial dari implementasi ekonomi Islam di masing-masing negara. Kajian longitudinal juga diperlukan untuk menilai arah transformasi kelembagaan serta kontribusi teknologi digital terhadap keberlanjutan dan perluasan akses ekonomi Islam. Ucapan terima kasih disampaikan kepada

seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terlaksananya penelitian ini, terutama lembaga resmi, akademisi, serta penyedia data dan referensi yang relevan. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi penguatan teori dan praktik ekonomi Islam di tingkat regional maupun global.

REFERENSI

- Al-Fadhli, M. (2024). *Shariah-Based Economic Reform in Saudi Vision 2030: A Policy Evaluation*. *Arabian Economic Review*, 12(1), 33–52. <https://doi.org/10.1108/AER-01-2024-0012>
- Al-Mutairi, S. (2022). *Fiscal Integration and Islamic Financial Stability in Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Monetary Policy*, 5(3), 201–219. <https://doi.org/10.1108/JIMP-2022-0028>
- Alqahtani, F., & Mayes, D. G. (2022). *Financial stability and Islamic finance: Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(2), 186–204. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2021-0195>
- Alqaralleh, H. (2023). *Islamic Finance, Vision 2030, and Sustainable Development in Saudi Arabia*. *Arab Journal of Administrative Sciences*, 30(2), 205–224. <https://doi.org/10.1108/AJAS-04-2023-0074>
- Al-Suhaibani, M. (2021). *Shariah Governance and Financial Stability in Islamic Banking: Evidence from Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 821–839. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0183>
- Alhomaidd, T. (2023). *Institutional Reforms and Islamic Economic Governance in Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(2), 114–129. <https://doi.org/10.1108/JIEFS-12-2023-0192>
- Amin, H., & Qattan, M. (2023). *Human capital development and Islamic finance resilience in GCC countries*. *Review of Islamic Economics*, 27(2), 125–144. <https://doi.org/10.1108/RIE-06-2023-0095>
- Asengbaramae, M. (2023). *Islamic microfinance development in minority Muslim regions: A case study of Thailand*. *Asian Economic and Financial Review*, 13(5), 431–448. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2023.135.431.448>
- Asengbaramae, M. (2023). *Islamic Microfinance Development in Thailand: Challenges and opportunities*. *Asian Economic and Financial Review*, 13(4), 389–407. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2023.134.389>
- Bashir, N., & Khan, T. (2024). *Digital Zakat Systems and Institutional Innovation in Islamic Finance*. *Journal of Fintech and Islamic Development*, 3(2), 145–162. <https://doi.org/10.1108/JFID-02-2024-0055>
- Chayut, N. (2022). *Participatory Islamic Finance and Social Accountability in Thailand*. *ASEAN Journal of Islamic Studies*, 9(3), 223–242. <https://doi.org/10.1108/AJIS-09-2022-0193>

- Fahad, H., & Alqahtani, N. (2024). *Fintech Shariah Hub and Digital Governance in Saudi Arabia*. *Journal of Islamic Digital Economy*, 4(2), 77–95. <https://doi.org/10.1108/JIDE-02-2024-0041>
- Hamat, A. (2022). *Community-based Islamic finance in Southeast Asia: Lessons from Thailand and Malaysia*. *Journal of Islamic Economics and Development*, 11(4), 287–304. <https://doi.org/10.51345/jied.2022.114.287>
- Hakim, A. (2024). *Islamic Financial Literacy and Institutional Strengthening in Southeast Asia*. *International Journal of Islamic Education and Economics*, 9(1), 91–108. <https://doi.org/10.1108/IJIEE-2024-0011>
- Hassan, A. (2023). *Comparative Institutional Frameworks in Islamic Economics: Lessons from ASEAN Countries*. *Review of Islamic Economics and Policy*, 17(4), 331–350. <https://doi.org/10.1108/RIEP-09-2023-0214>
- IsDB. (2023). *Annual Report: Enhancing Resilience in Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank. <https://www.isdb.org>
- Ismail, Z. (2023). *Revisiting Maqasid al-Shariah for Sustainable Islamic Economy*. *Journal of Islamic Economic Studies*, 31(2), 255–273. <https://doi.org/10.1108/JIES-04-2023-0132>
- Islamic Finance Development Indicator (IFDI). (2023). *Global Islamic Finance Report 2023*. Kuala Lumpur: ICD–Thomson Reuters. <https://icd-ps.org/uploads/files/ifdi2023>
- Karim, M., & Alqahtani, F. (2023). *Liquidity risk and systemic stability in Islamic financial markets*. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(1), 71–89. <https://doi.org/10.1108/JIFS-01-2023-0011>
- Khan, A. (2024). *Shariah Audit and Accountability Frameworks in Gulf Islamic Banks*. *International Review of Islamic Finance*, 15(2), 141–162. <https://doi.org/10.1108/IRIF-2024-0061>
- Mahmud, F. (2021). *Faith and Sustainability: Islamic Economic Practices in Buddhist Societies*. *Journal of Religion and Development*, 8(4), 267–285. <https://doi.org/10.1108/JRD-11-2021-0174>
- Nattapong, T. (2022). *Regulatory Flexibility and Islamic Economic Innovation in Thailand*. *Asia-Pacific Journal of Islamic Policy*, 7(1), 67–86. <https://doi.org/10.1108/APJIP-01-2022-0016>
- Nor, M. H. (2022). *Institutional challenges in developing Islamic banking system in minority Muslim countries*. *International Journal of Islamic Business and Management*, 6(4), 85–102. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v6i4.1987>
- Rahim, N. (2022). *Islamic Financial Diplomacy in the Gulf Region*. *Middle East Journal of Finance and Economics*, 11(2), 301–320. <https://doi.org/10.1108/MEJFE-02-2022-0075>
- Rahman, M. (2022). *Institutional Transformation and the Future of Islamic Economics*. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 451–468. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2022-0178>

- Rasmees, S. (2024). *Regional Collaboration of Islamic Financial Institutions in ASEAN*. *ASEAN Review of Islamic Finance*, 8(1), 49–68. <https://doi.org/10.1108/ARIF-01-2024-0005>
- Rohman, M., & Salleh, H. (2024). *Institutional Synergy and Resilience in Islamic Economic Governance*. *Global Journal of Islamic Policy and Management*, 6(3), 177–196. <https://doi.org/10.1108/GJIPM-03-2024-0072>
- Saudi Central Bank (SAMA). (2024). *Annual Islamic Finance Report 2024*. Riyadh: Saudi Central Bank. <https://www.sama.gov.sa>
- Siriporn, W. (2023). *Islamic Microfinance and Community Development in Thailand*. *Asian Journal of Development Research*, 6(2), 99–118. <https://doi.org/10.1108/AJDR-02-2023-0054>
- Srisompob, J. (2022). *Islamic Banking and Community Empowerment in Southern Thailand*. *Asian Journal of Social Science Research*, 5(1), 77–93. <https://doi.org/10.32614/ajssr.v5i1.982>
- Usman, S., Noor, M., & Ahmad, I. (2024). *Islamic Social Enterprise and Women Empowerment in Thailand*. *Journal of Islamic Social Economy*, 11(1), 59–78. <https://doi.org/10.1108/JOISE-01-2024-0023>
- Yousef, A. (2023). *Modernization and Islamic Economic Thought: A Critical Reflection*. *Contemporary Islamic Studies*, 15(1), 41–58. <https://doi.org/10.1108/CIS-01-2023-0006>
- Yusri, M., & Ahmad, R. (2023). *Islamic Digital Inclusion in Rural Thailand: A Case Study of MicroPay*. *Journal of Islamic Technology Studies*, 2(3), 188–204. <https://doi.org/10.1108/JITS-03-2023-0067>